



PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN STRATEGIS PERIKANAN BUDIDAYA, DAN TATA KELOLA PERIZINAN UNTUK MEMACU INVESTASI



Disampaikan pada *Workshop* Pembangunan Perikanan budidaya berkelanjutan yang diselenggarakan Kementerian PPN/BAPPENAS, 9 September 2019 di *Double Tree by Hilton*, Jakarta



LATAR BELAKANG

UU NOMOR 17
TAHUN 2007 :
RPJPN 2005 -2025
VISI:
Indonesia yang
mandiri, maju, adil,
dan makmur

RPJMN ke 4 (2005-2025)

Difokuskan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

RETHINKING

Perubahan paradigma pembangunan PB dari hanya berorientasi pada peningkatan produksi menjadi berorientasi pada pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan mempertimbangkan potensi daya dukung lingkungan, ekonomi dan sosial di wilayah pengelolaan perikanan budidaya

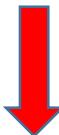
MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA

Pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis pada kepentingan nasional dan didukung oleh SDM yang berkualitas

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005 -2025

VISI : Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur

MISI : Mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, dengan berbasis kepentingan nasional



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 -2024

TEMA : Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan

ARAH KEBIJAKAN : Percepatan pembangunan di berbagai bidang yang menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

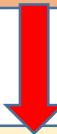
FOKUS : Pembangunan Manusia, Ekonomi, Kewilayahan, Infrastruktur, Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

PENGARUSUTAMAAN : Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Perubahan Iklim / Kerentanan Bencana, Modal Sosial Budaya, Transformasi Digital

INTEGRASI KEBIJAKAN : *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

RANCANGAN TEKNOKRATIK RENSTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024

VISI	: Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berdaulat, maju, mandiri dan berbasis kepentingan nasional
MISI	: Kedaulatan (<i>Sovereignty</i>), Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>), dan Kesejahteraan (<i>Prosperity</i>)
KEBIJAKAN POKOK	: Pemberantasan IIU Fishing; Peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab & berkelanjutan; Penguatan daya saing dan nilai tambah industri perikanan; Pembangunan kelautan berbasis kewilayahannya; Peningkatan kesejahteraan <i>stakeholders</i> KP; Penguatan daya saing SDM, Inovasi Teknologi & Riset
PENGARUSUTAMAAN	: Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Pembangunan Berkelanjutan, Modal Sosial Budaya, Transformasi Digital



RANCANGAN TEKNOKRATIK PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA 2020-2024

PERUBAHAN PARADIGMA	: Orientasi peningkatan produksi menjadi pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan mempertimbangkan potensi daya dukung lingkungan, ekonomi dan sosial di WPP budidaya
ARAH KEBIJAKAN	: Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Berkelanjutan
FOKUS	: Pembangunan Ekonomi (pangan dan industrialisasi) dan Kewilayahannya (sentra produksi dan komoditas unggulan)
KEBIJAKAN POKOK	: Peningkatan efektivitas tata kelola sumberdaya perikanan budidaya yang bertanggung jawab & berkelanjutan; Penguatan daya saing dan nilai tambah industri perikanan budidaya; Pembangunan perikanan budidaya berbasis kewilayahannya; Peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan budidaya
PENGARUSUTAMAAN	: Peningkatan peran dan akses gender; <i>human, information, organization, and financial capital</i> , Implementasi SDGs, pembangunan inklusif dan berwawasan budaya, layanan digital terintegrasi dan e-commerce



LANDASAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA 2020-2024

UUD 1945

- Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

PP Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran



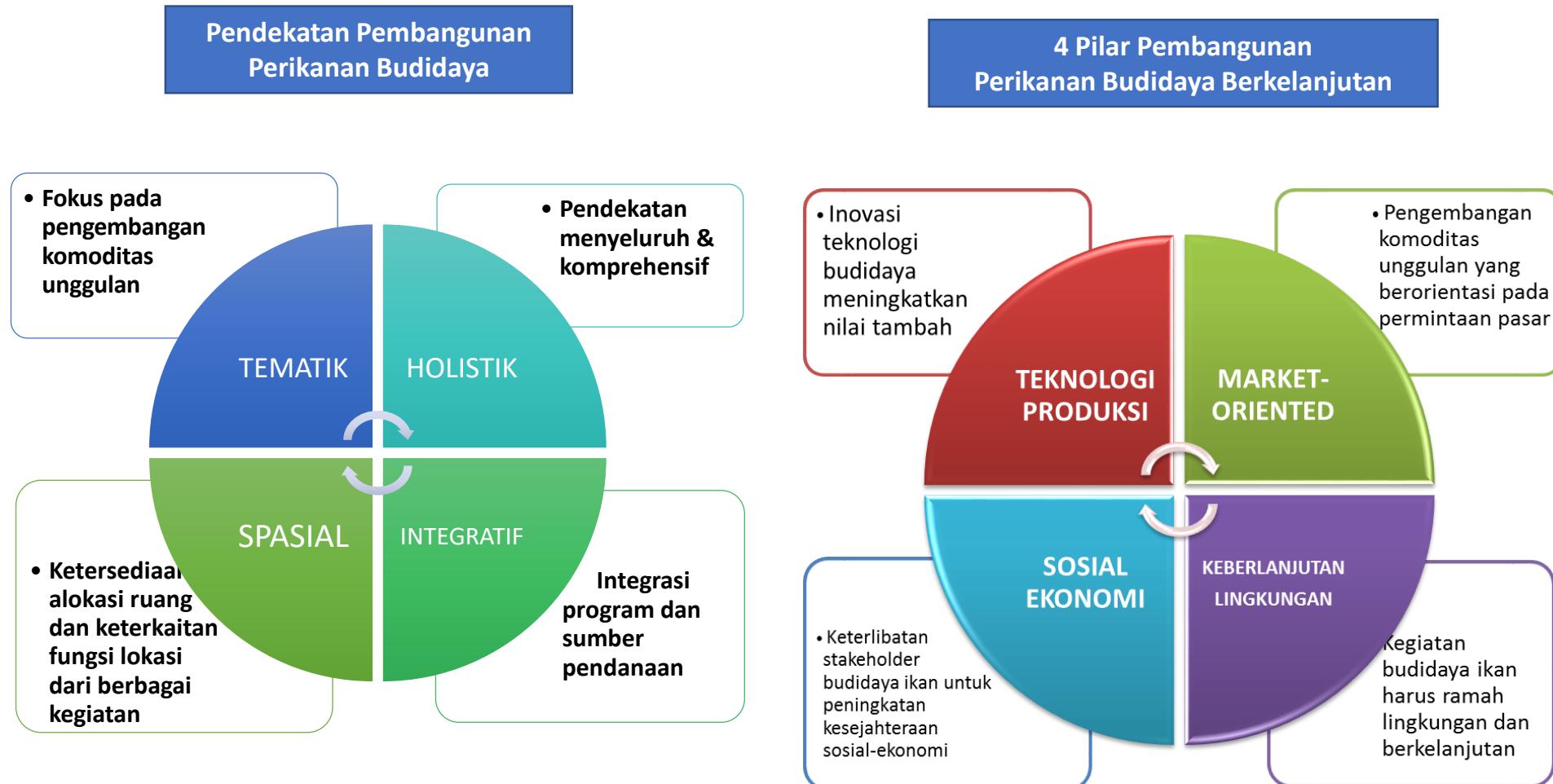
UU RPJPN 2005-2025	UU Perikanan 31/2004 jo 45/2009	UU Pangani 18/2012	UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam UU 7/2016	UU Penataan Ruang 26/2007	UU Pemerintahan Daerah 23/2014
<ul style="list-style-type: none">• Potensi laut 5,8 juta km², potensi lestari SDA perikanan mencapai 53,9 juta ton/tahun• Pemanfaatan SDA perikanan dilakukan secara rasional, optimal, dan efisien, serta harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya.• Mewujudkan industri perikanan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Menteri KP menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan budidaya, a.l. potensi dan alokasi lahan budidaya ikan, induk, benih, dan jenis ikan yang diperbolehkan dibudidayakan di WPP RI, perlindungan pembudidaya, pencegahan penyakit, penyediaan permodalan, mendorong kemitraan usaha, dan pemberian izin usaha	<ul style="list-style-type: none">• Pembudidaya ikan termasuk dalam kelompok masyarakat yang berkontribusi sebagai produsen pangan• Pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan di bidang Gizi melalui peningkatan konsumsi pangan hasil produk perikanan• Pembudidaya ikan wajib menerapkan norma dan standar keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none">• Strategi perlindungan melalui penyediaan prasarana usaha, jaminan kepastian usaha, jaminan resiko pembudidayaan ikan, pengendalian impor, dan jaminan keamanan• Strategi pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses IPTEK, dan penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Jenis kawasan budidaya termasuk didalamnya kawasan peruntukan perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Pembagian kewenangan: Provinsi mengelola budidaya laut, Kabupaten mengelola budidaya air payau dan tawar• Pembagian urusan: Provinsi mengurusi peneribatan izin usaha lintas kabupaten. Kab/Kota mengurusi izin usaha dalam kabupaten, pemberdayaan pelaku usaha, dan pengelolaan pembudidayaan ikan



PP Pembudidayaan Ikan 28 tahun 2017	PP Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 17/2017	Perpres Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 59/2017
<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan pemanfaatan lahan dan air untuk budidaya ikan• Pengaturan plasma nutfah (pengambilan dan pemuliaan induk dan benih) dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan SDI• Penggunaan sarana budidaya ikan (pakan, obat, pupuk, alat angkut, alat dan mesin)• Penggunaan prasarana budidaya ikan (wadah, saluran, unit pemberian, dll)• Pengendalian mutu melalui CBIB dan CPIB• Penyelenggaraan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Penganggaran berbasis program dan berbasis kinerja• Keterpaduan RPJMN, RKP, Renstra K/L, dan Program Eselon 1• Pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial	<ul style="list-style-type: none">• SDG II: PB berperan dalam ketahanan pangan & pemenuhan gizi• SDG XIV: Tata kelola 11 WPP• SDG XV: PB memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat



PENDEKATAN DAN PILAR PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA 2020-2024





PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PERIKANAN BUDIDAYA 2020-2024

LINGKUNGAN INTERNAL



Pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya belum optimal



Keterbatasan infrastruktur pendukung



Keterbatasan ketersediaan input produksi



Ketergantungan impor sarana produksi



Manajemen sertifikasi sistem produksi



Kompetensi manajemen SDM pembudidaya ikan skala kecil



Terbatasnya permodalan usaha dan akses modal



Kelembagaan pembudidaya ikan masih lemah



Kesadaran pengendalian penyakit dan lingkungan lemah

LINGKUNGAN EKSTERNAL



Ketatnya persyaratan hasil produk perikanan di pasar global



Keterbatasan akses pasar



Perubahan iklim



MEA dan perdagangan bebas



Peraturan lintas sektor masih lemah



Pembagian kewenangan konkuren tidak pro budidaya



Ketersediaan energi terbarukan



Penurunan daya dukung lingkungan



Keterlibatan perempuan perlu ditingkatkan



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN : PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA BERKELANJUTAN

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN BERKELANJUTAN

- Peningkatan tata kelola pemanfaatan lahan dan air berbasis daya dukung dan komoditas unggulan
- Implementasi teknologi ramah lingkungan
- Pemanfaatan perairan umum untuk kegiatan PB berkelanjutan
- Sertifikasi perikanan budidaya
- Perlindungan lingkungan perikanan budidaya
- Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- Adaptasi perubahan iklim

KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUksi PB YANG BERKELANJUTAN

- Pengembangan komoditas unggulan lokal dan ekspor
- Penataan sistem logistik perbenihan
- Penyediaan input produksi yang efisien (induk, benih, obat, pakan, peralatan)
- Pembangunan infrastruktur PB
- Revitalisasi sarana prasarana produksi perbenihan
- Inovasi, diseminasi, dan pendampingan teknologi budidaya yang modern dan berkelanjutan
- Tata kelola kemitraan usaha (pembudidaya dan penyedia modal)

KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEMBUDIDAYA

- Perlindungan usaha bagi pembudidaya skala kecil
- Pembinaan kelembagaan pelaku usaha
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
- Sertifikasi lahan pembudidaya
- Kemudahan Akses permodalan dan stimulus usaha bagi pembudidaya skala kecil
- Keterlibatan peran perempuan



DUKUNGAN LINTAS SEKTOR:
HARMONISASI REGULASI DAN INTEGRASI LINTAS SEKTOR



PROGRAM DAN TARGET INDIKATOR KINERJA PERIKANAN BUDIDAYA 2020-2024

PROGRAM:

“PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA BERKELANJUTAN”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Budidaya	Perikanan Budidaya: 18,44 juta ton ➤ Ikan : 7,45 ➤ Rumphut Laut: 10,9 Ikan Hias : 1,87 milyar ekor	Perikanan Budidaya: 19,47 juta ton ➤ Ikan : 7,92 ➤ Rumphut Laut: 11,55 Ikan Hias : 1,98 milyar ekor	Perikanan Budidaya: 20,54 juta ton ➤ Ikan : 8,69 ➤ Rumphut Laut: 11,85 Ikan Hias : 2,1 milyar ekor	Perikanan Budidaya: 21,58 juta ton ➤ Ikan : 9,47 ➤ Rumphut Laut: 12,10 Ikan Hias : 2,22 milyar ekor	• Perikanan Budidaya: 22,65 juta ton ➤ Ikan : 10,32 ➤ Rumphut Laut: 12,33 Ikan Hias : 2,33 milyar ekor
Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	• NTPi: 101 • NTUPI: 115 • Pendapatan pembudidaya: Rp. 3,45 juta	• NTPi: 101.5 • NTUPI: 116 • Pendapatan pembudidaya: Rp. 3,5 juta	• NTPi: 102 • NTUPI: 117 • Pendapatan pembudidaya: Rp. 3,55 juta	• NTPi: 102.5 • NTUPI: 118 • Pendapatan pembudidaya: Rp. 3,65 juta	• NTPi: 103 • NTUPI: 120 • Pendapatan pembudidaya: Rp. 3.7 juta
Terbangunnya kluster kawasan sentra produksi perikanan budidaya	10 kawasan	20 kawasan	30 kawasan	40 kawasan	50 kawasan



PROYEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

TAHUN 2020 – 2024





PROYEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA 2020-2024

Satuan : Ton

No.	KOMODITAS	TAHUN					
		TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>NASIONAL</u>		<u>18 440 000</u>	<u>19 470 000</u>	<u>20 540 000</u>	<u>21 580 000</u>	<u>22 650 000</u>
1	Udang		1 208 433	1 251 670	1 342 740	1 431 183	1 520 836
2	Rumput Laut		10 990 000	11 550 000	11 850 000	12 100 000	12 330 000
3	Bandeng		917 626	994 461	1 126 461	1 276 338	1 450 032
4	Kerapu		15 567	15 844	16 855	17 935	19 135
5	Kakap		9 957	10 648	11 714	12 730	13 726
6	Kekerangan		86 783	94 050	106 534	120 708	137 135
7	Ikan Mas		697 384	749 224	828 133	904 100	979 438
8	Nila		1 600 627	1 719 610	1 900 721	2 075 079	2 247 993
9	Lele		1 494 691	1 513 203	1 593 554	1 671 619	1 751 719
10	Patin		575 556	623 749	706 542	800 549	909 493
11	Gurame		317 188	343 747	389 374	441 181	501 220
12	Bawal Bintang		2 144	2 291	2 519	2 735	2 947
13	Lainnya		524 043	601 503	664 854	725 842	786 326
	Ikan		6,241,567	6,668,330	7,347,260	8,048,817	8,799,164
	Rumput Laut		10,990,000	11,550,000	11,850,000	12,100,000	12,330,000
	Udang		1,208,433	1,251,670	1,342,740	1,431,183	1,520,836

* Ikan lainnya: mujair, nilem, betok/papuyu, belida, sepat, tambakan, betutu, toman, gabus, jelawat, baung, bawal tawar, belut, sidat, tawes, belanak



PROYEKSI PRODUKSI IKAN HIAS BUDIDAYA 2020-2024 (BERDASARKAN TREND PRODUKSI)

No.	KOMODITAS	PROYEKSI IKAN HIAS (1.000 EKOR)				
		TAHUN	2020	2021	2022	2023
	<u>NASIONAL</u>		<u>1 872 766</u>	<u>1 989 211</u>	<u>2 105 656</u>	<u>2 222 101</u>
1	Koi		546 145	580 289	614 434	648 579
2	Mas Koki		71 651	83 115	96 414	111 840
3	Arwana		13 604	14 860	16 117	17 373
4	Botia		19 135	20 902	22 668	24 435
5	Cupang		238 930	255 723	272 517	289 311
6	Oskar		16 782	19 299	22 194	25 523
7	Discus		13 016	13 129	13 241	13 354
8	Manfis		53 534	56 655	59 776	62 897
9	Plati		68 939	71 683	74 428	77 172
10	Moly		81 473	87 535	93 597	99 659
11	Gapi		70 312	72 871	75 431	77 991
12	Corydoras		15 492	15 976	16 459	16 942
13	Nemo		340	347	354	361
14	Kuda Laut		6	7	8	9
15	Banggai Cardinalfish		42	46	51	56
16	Blue Devil/Betok Ambon		34	39	43	48
17	Lainnya		663 332	696 734	727 924	756 552
						782 213

Udang

POTENSI DAN PELUANG

POTENSI LAHAN



POTENSI LAHAN

2.964.331,24 Ha



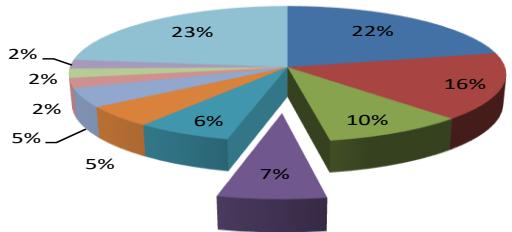
PEMANFAATAN

605.908,818 Ha

Pemanfaatan lahan untuk budidaya udang sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 20 % dari keseluruhan potensi yang dimiliki, masih sangat terbuka untuk pengembangan lahan untuk budidaya udang dengan ekstensifikasi dengan memperhatikan RTRW di setiap daerah

POTENSI PASAR

SHARE EKSPOR UDANG DUNIA, 2018



- India
- Ecuador
- Viet Nam
- Indonesia
- Argentina
- Thailand
- China
- Netherlands
- Mexico
- Spain
- Lainnya

15 Negara Tujuan
Ekspor



Ekspor udang Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia baru memenuhi 7% dari total kebutuhan udang dunia

United States of America
Japan
China
Malaysia
Viet Nam
United Kingdom
Taipei, Chinese
Hong Kong, China
Singapore
Canada
Netherlands
France
Germany
Australia
Korea, Republic of

ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI UDANG

Potensi tambak Indonesia sebesar 2.964.331,24 Ha
Dengan potensi terbesar Sumatera 34%, Kalimantan 23%, Jawa 14%

Peningkatan produksi udang. Adanya Introduksi udang vaname dari Hawaii.

Mulai terdeteksi penyakit baru seperti IMNV dan IHHNV

Udang merupakan komoditas penting dengan volume produksi nasional sebesar 886.520 ton. Pulau Jawa merupakan kontributor terbesar sebesar 28,52% (252.813,89 ton) dan Pulau Sumatra sebesar 18,61% (165.020,35 ton)

2000

2006

2018*

1997

Puncak kejayaan produksi udang khususnya udang windu

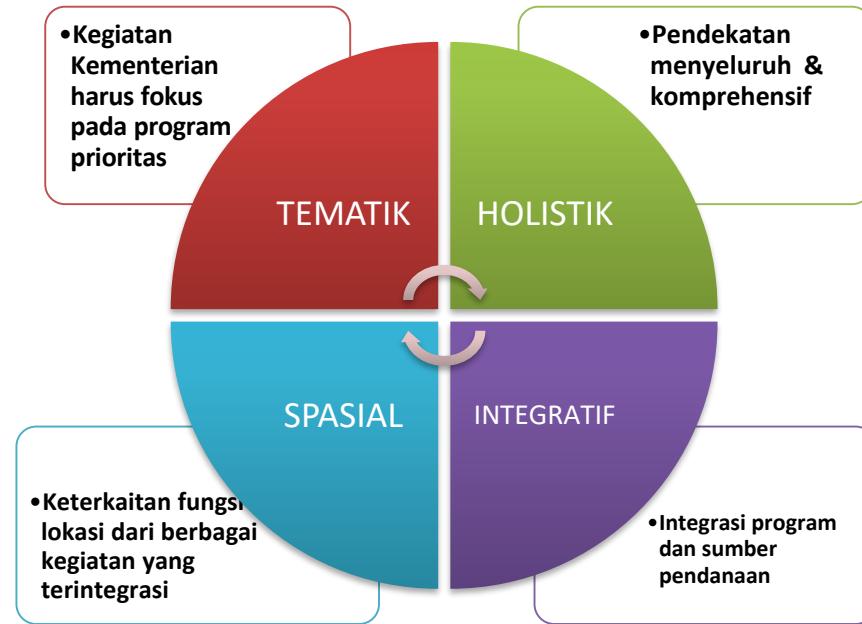
2004

Serangan virus WSSV dan TSV. Mengakibatkan penurunan produksi udang cukup signifikan.

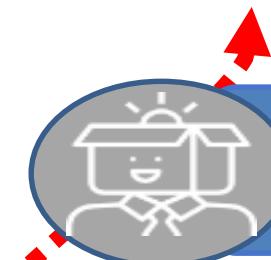
2011

Produksi udang meningkat kembali. Adanya Kebijakan revitalisasi tambak kosong di seluruh Indonesia dan penemuan teknologi palstik mulsa serta penggunaan probiotik, dan penerapan biosecurity yang ketat di tambak udang

ARAH PENGEMBANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN UDANG NASIONAL



Pengembangan Budidaya Udang yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan



Inovasi Teknologi Tambak Udang Intensif Berkelanjutan



Pengaturan regulasi usaha, sertifikasi, perizinan, & perlindungan penyakit



Penguatan Kelembagaan Kelompok Berbadan Hukum (Koperasi)



Integrasi Program Pengembangan Udang DJPB dengan Lintas Sektor

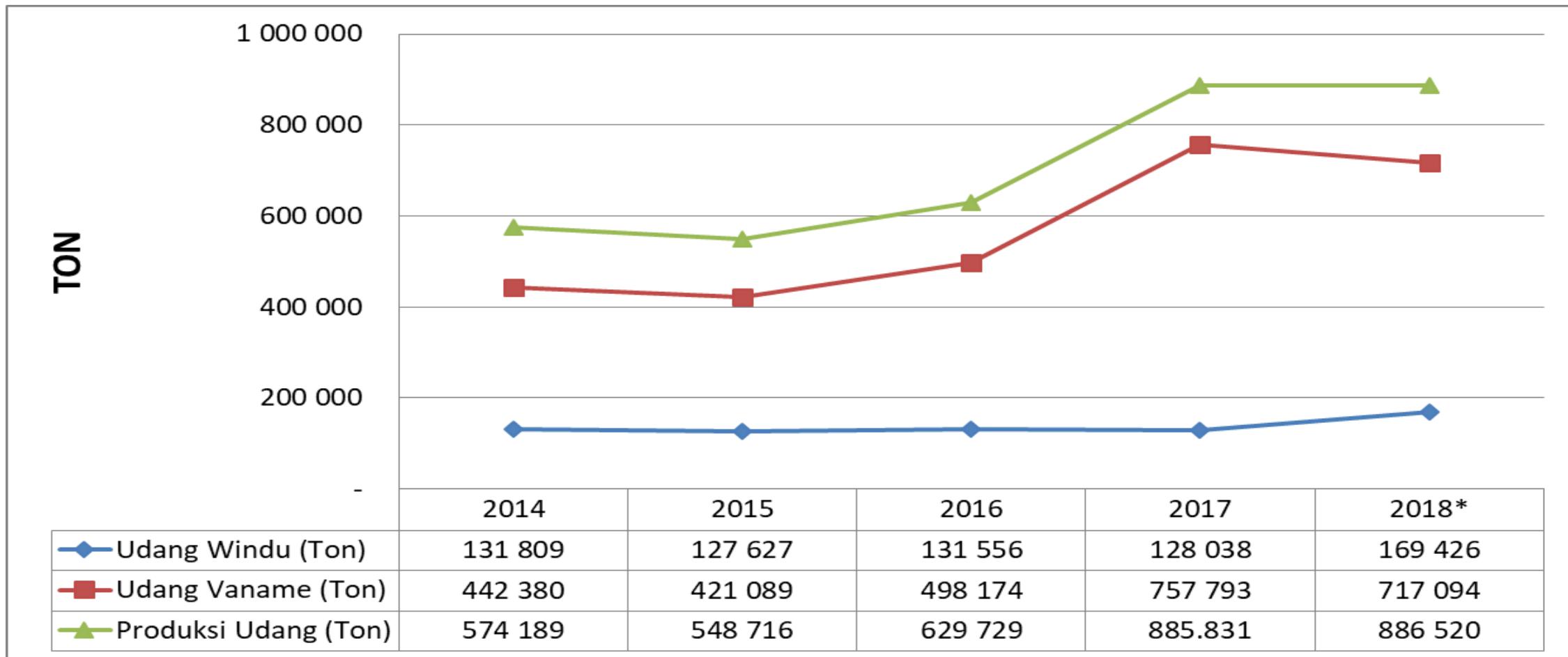


Clusterisasi Kawasan Udang Vaname



Perbaikan Prasarana (Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak) dan Sarana (Excavator)

PERKEMBANGAN PRODUKSI UDANG, 2014 – 2018*



Sumber Data :

2014-2016 : Statistik Perikanan Budidaya

2017-2018* (Sementara): Satu Data KKP

TARGET PRODUKSI UDANG 2020-2025

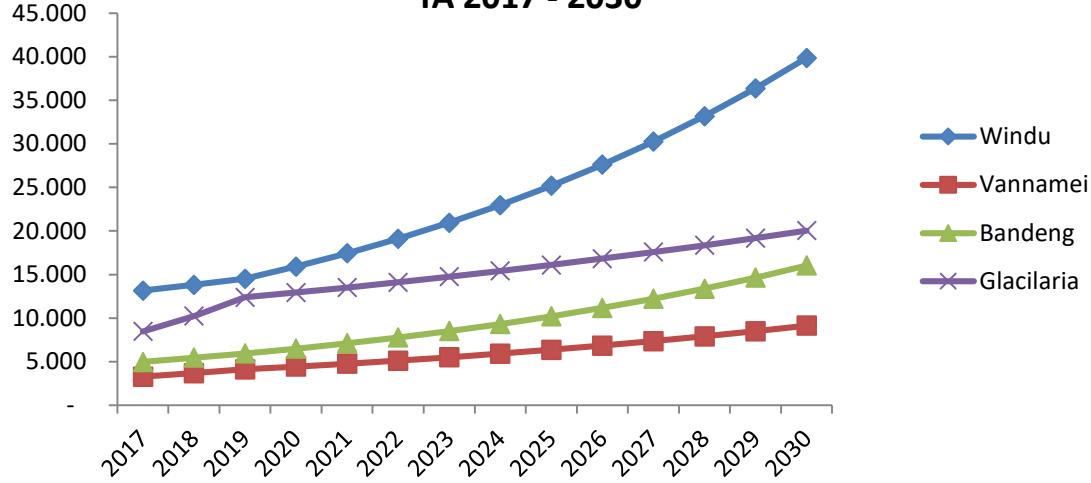
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL	934 922	991 155	1 047 387	1 103 620	1 159 853	1 216 086

ASUMSI :

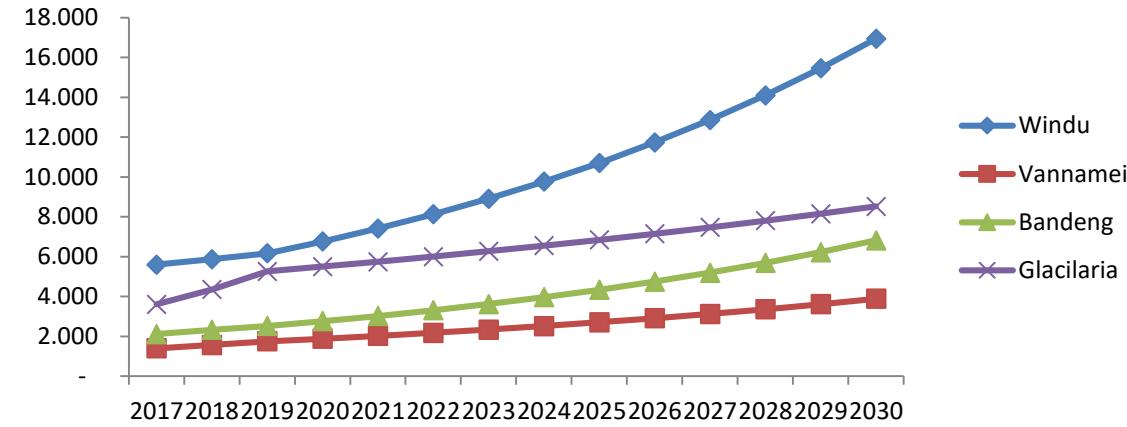
1. Inovasi teknologi mengakibatkan peningkatan intensifikasi lahan untuk kegiatan budidaya udang sehingga produktifitas meningkat 5,40% pertahun;
2. Kemudahan akses permodalan mendorong tumbuhnya kembali minat pembudidaya kecil untuk melakukan usaha budidaya dengan teknologi sederhana dan ekstensifikasi lahan atau pemanfaatan lahan idle. Ekstensifikasi lahan diasumsikan tumbuh 1,16% pertahun;
3. Perhitungan menggunakan trend linier karena diasumsikan tidak ada perubahan kondisi yang ekstrim yang bisa mempengaruhi produksi udang.

TARGET KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR 2017 - 2030

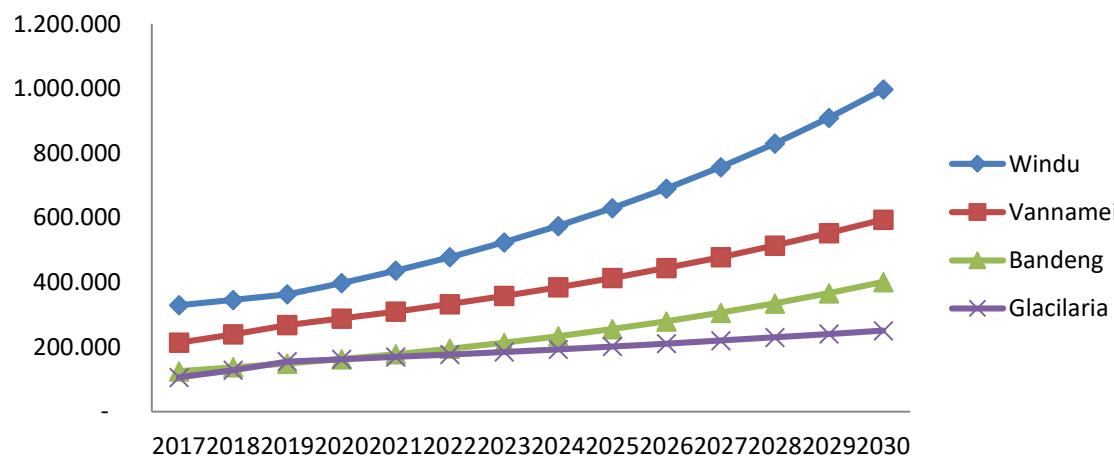
KEBUTUHAN JALAN PRODUKSI
TA 2017 - 2030



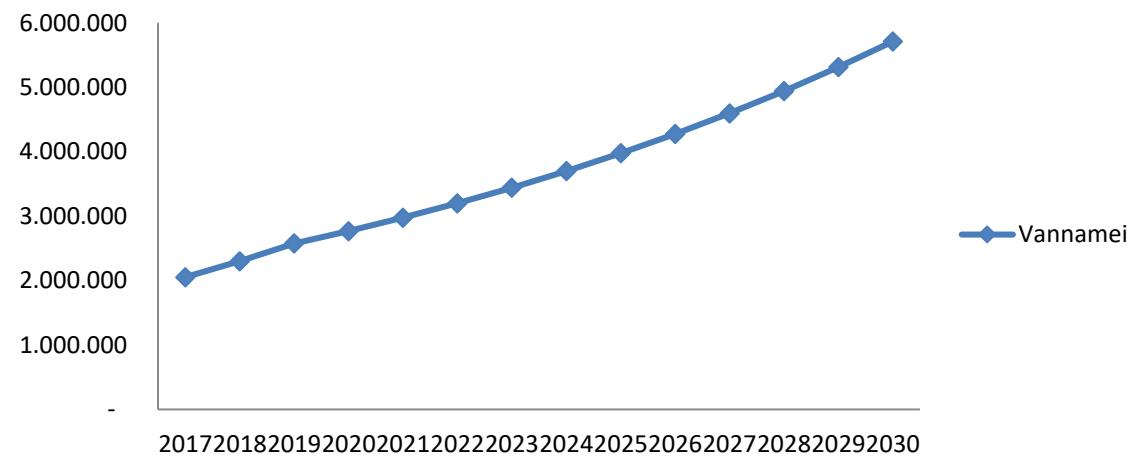
KEBUTUHAN SALURAN IRIGASI
TA 2017 - 2030



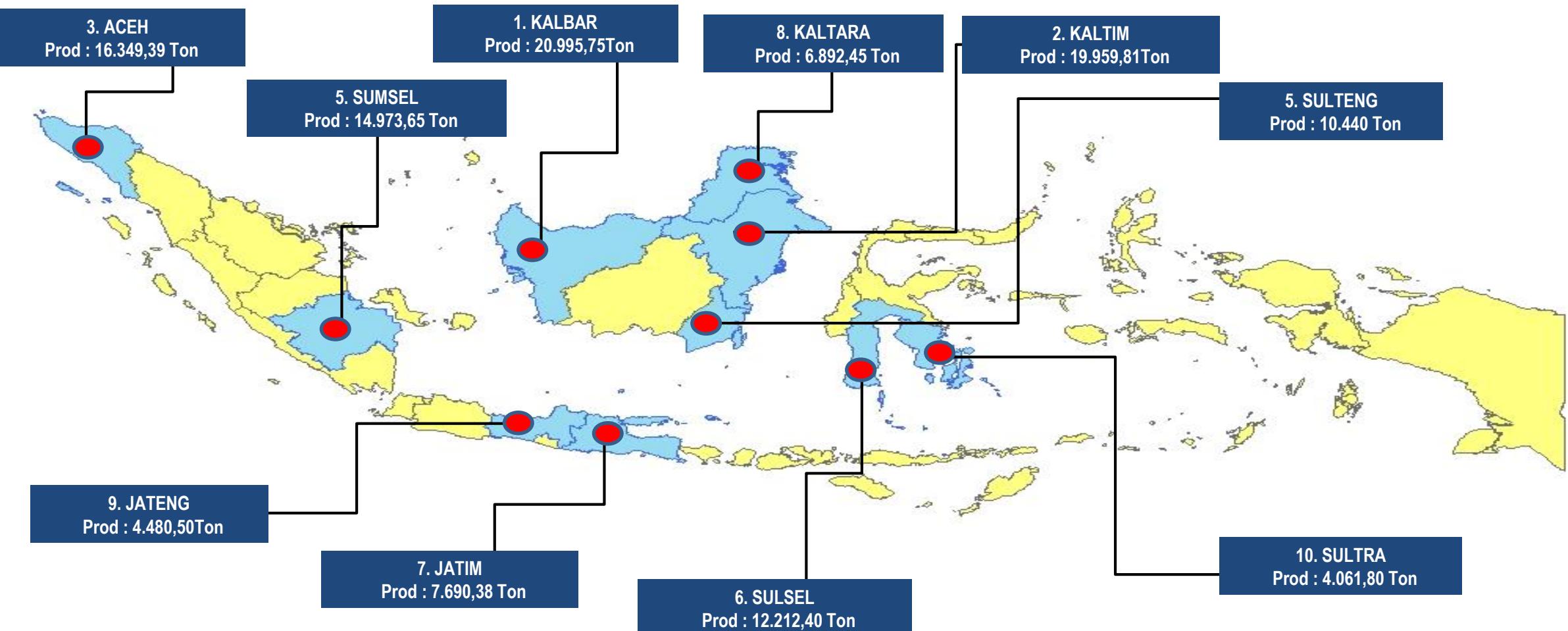
KEBUTUHAN TENAGA KERJA
TA 2017 - 2030



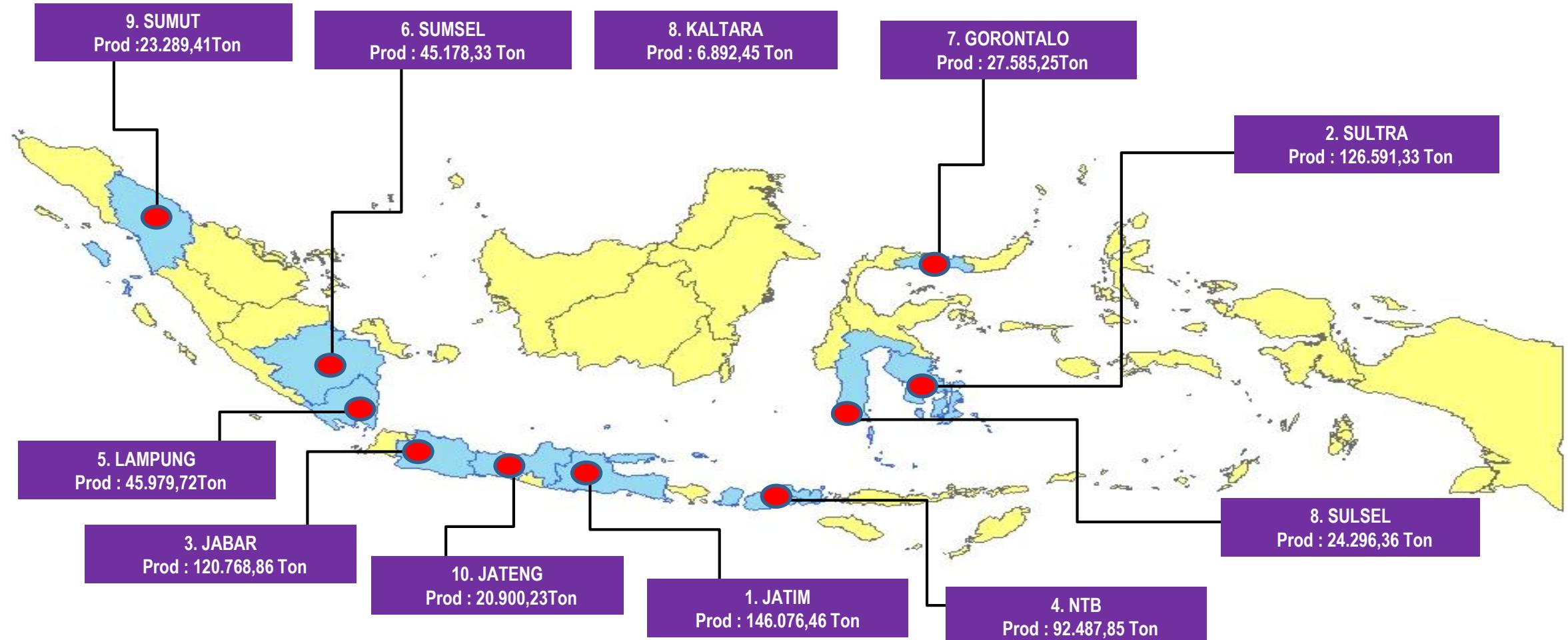
KEBUTUHAN LISTRIK
TA 2017 - 2030



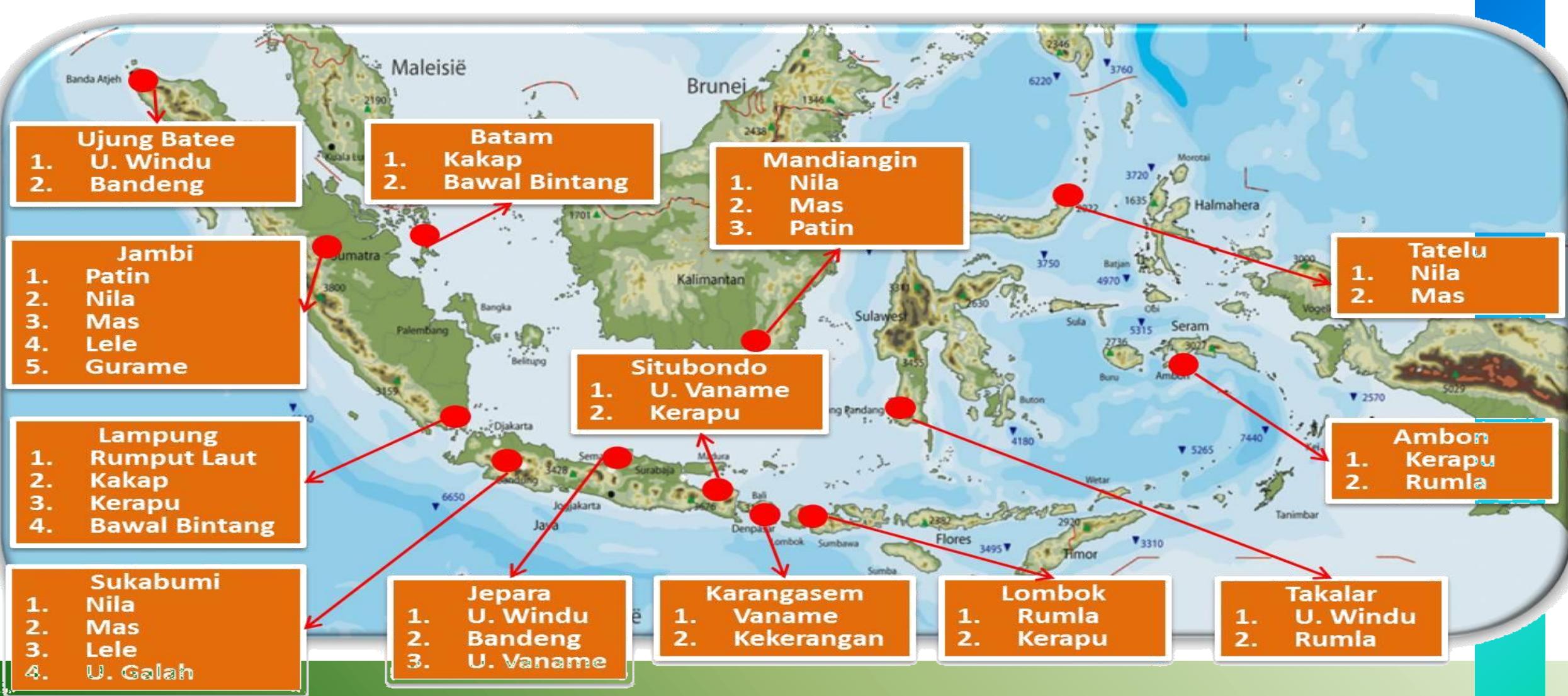
SENTRA PRODUKSI UDANG WINDU, 2017



SENTRA PRODUKSI UDANG VANAME, 2017



Peta Roadmap Lokasi Sentra Produksi Induk



PENGEMBANGAN UDANG DI SULAWESI TENGAH



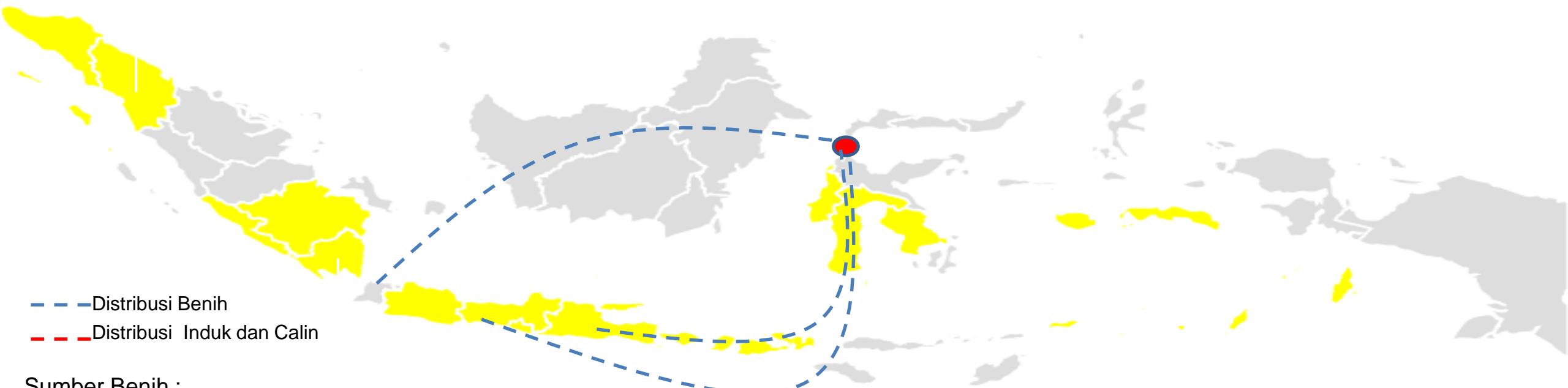
POTENSI LAHAN

90.962,22 Ha



PEMANFAATAN

8.290 Ha



Sumber Benih :
Prov Banten, Jawa Timur, dan Jawa
Tengah

TARGET PRODUKSI (Ton)

2020	2021	2022	2023	2024
21.114,53	22.384,50	23.654,48	24.924,45	26.194,43

KEBUTUHAN BENJUR (1000 ekor)

2020	2021	2022	2023	2024
1.809.816	1.918.672	2.027.527	2.136.382	2.245.237

KEBUTUHAN PAKAN (Ton)

2020	2021	2022	2023	2024
259.942.179	275.576.927	291.211.674	306.846.422	322.481.170

RENCANA PENGEMBANGAN PEMBENIHAN, PENDEDERAN dan PEMBESARAN

Pengadaan dan distribusi benih berkualitas

- Revitalisasi dan mendorong BBU (UPTD), dan HSRT untuk meningkatkan produksi benih udang berkualitas
- Peningkatan produksi benur berkualitas di 5 Balai utama: BBAP Situbondo, BBPBAP Jepara, BBAP Takalar, dan BBAP Ujung Batee Aceh
- Pembinaan dan pengawalan dalam penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan sertifikasi pembenihan bagi hatchery besar dan rakyat (HSRT) oleh tenaga penyuluhan, pembina dan pengawas pembudidayaan UPT pusat dan daerah.
- Pengaturan sistem distribusi benur dengan jaringan produksi benur dan pembesaran dengan prinsip efisiensi
- Pelatihan teknis pembenihan dan pendederan bagi tehnisi HSRT dan pendederan

Revitalisasi sistem produksi pembesaran dengan input teknologi dan bimbingan teknis

- Rehabilitasi tambak dan saluran tersier melalui penggunaan back-hoe
- Penerapan sistem budidaya sesuai dengan prinsip-prinsip budidaya ikan yang baik (CBIB) dan pengaturan waktu penebaran benih yang tepat untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku
- Pengembangan kawasan (Klaster) secara bertahap dan berkesinambungan
- Penerapan sistem pemberian pakan efisien sesuai kebutuhan dengan pakan berkualitas;
- Penggunaan teknologi probiotik untuk menstabilkan kualitas air dan penyuburan tanah dan air.
- Perbaikan sistem manajemen air tambak selama produksi: intake-outlet systems
- Sistem penanggulangan hama dan penyakit terintegrasi
- Penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan teknis
- Sistem pengawasan penggunaan anti biotik
- Sistem penanganan ikan yang baik untuk efisiensi dan jaminan kualitas: panen dan pasca panen



Peran swasta terutama untuk:

1. Mengembangkan kemitraaan usaha dengan para pembudidaya udang (pembinaan, menampung dan memasarkan hasil produksi);
2. Ikut terlibat dalam produksi benih udang berkualitas untuk membantu memenuhi kebutuhan pasar;
3. Menyediakan pakan berkualitas dan harga terjangkau, untuk meningkatkan *competitiveness* produk udang hasil budidaya.

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

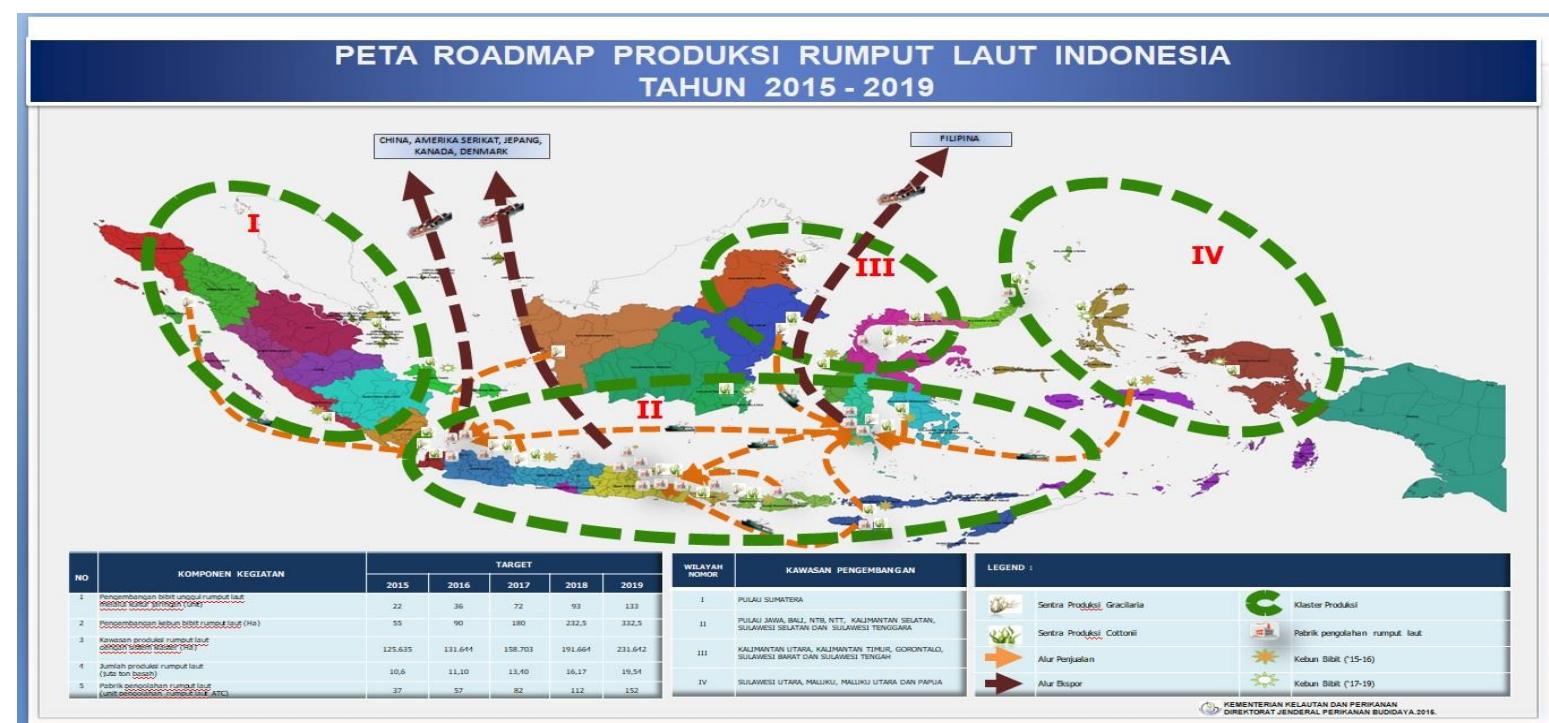
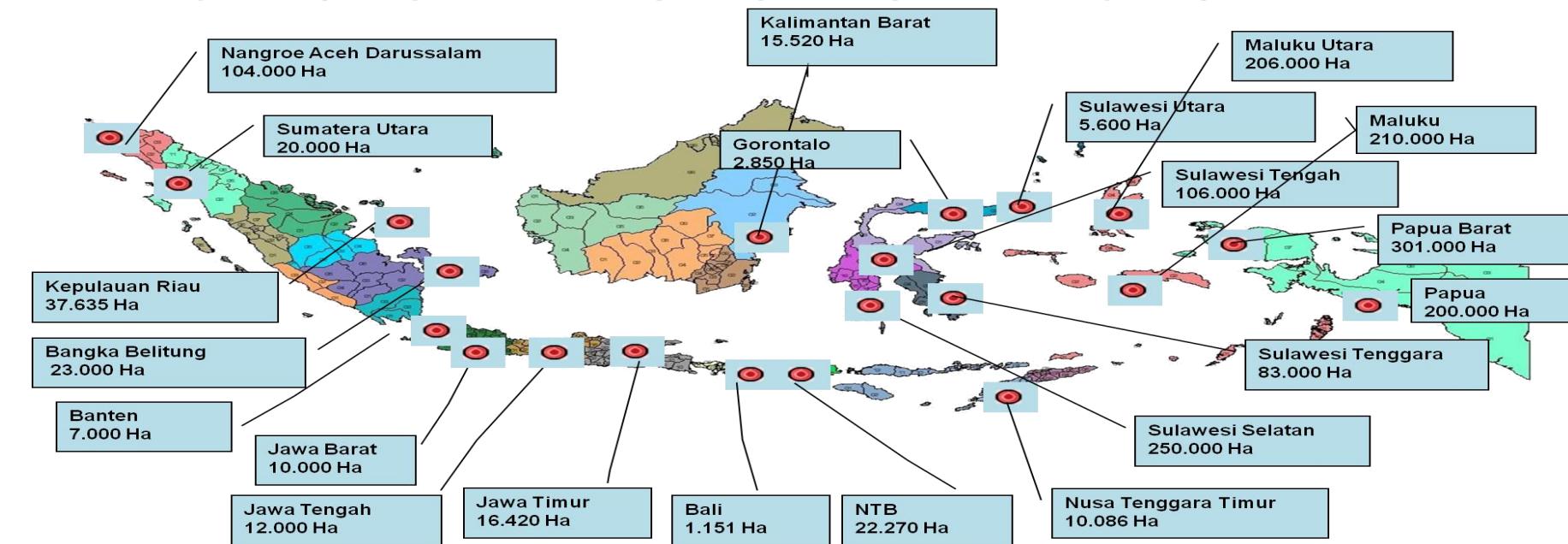
NO	INFRASTRUKTUR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Penyediaan air bersih	Kementerian PU, Pemkab/Kota
2.	Penyediaan sarana prasarana pembenihan dan pemasaran	KKP, Pemkab/Kota
3.	Penyediaan lahan sentra budidaya udang	Pemkab/Kota
4.	Penyediaan rehabilitasi saluran primer, sekunder dan tersier	Kementerian PU, KKP, Pemkab/Kota

KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN

1. Membentuk kelembagaan organisasi yang berfungsi dalam koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi;
2. Identifikasi lokasi harus dapat memastikan bahwa tambak-tambak *idle* yang ada atau tidak operasional secara optimal dapat direvitalisasi dengan memperhatikan kondisi teknis yang dipersyaratkan dan didukung sarana/prasarana yang memadai;
3. Penerapan CBIB dan bio-security wajib dilakukan;
4. Penggunaan benur bermutu (SPF) yang bersumber dari hatchery bersertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB).
5. Untuk produksi benur udang windu menggunakan induk windu hasil pemuliaan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. Sedangkan untuk benur udang vaname menggunakan VN-1 hasil pemuliaan induk Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Situbondo;

Rumput laut

PETA POTENSI BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI INDONESIA



ISU RUMPUT LAUT INDONESIA SAATINI



- 1) Kekurangan bibit yang berkualitas;
- 2) Pengolah dalam negeri klaim kekurangan bahan baku;
- 3) Harga relatif tinggi dan berlangsung cukup lama;
- 4) Kondisi alam “unpredicted climate” dan pasar fluktuatif;
- 5) Kebijakan pemerintah yang spontan memberikan solusi jangka pendek;
- 6) Terjadi persaingan yang tidak sehat antara kepentingan bahan baku dalam negeri dan luar negeri;

Permasalahan yang dihadapi

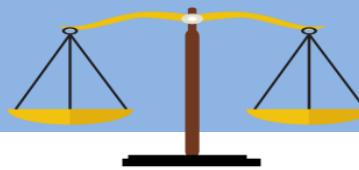
No	Hulu	Hilir	Industri
1.	Belum semua sentra RL punya tata ruang untuk budidaya rumput laut	Kualitas pasca panen yang kurang baik utamanya disebabkan oleh fasilitas (sarana logistik)	Kesulitan bahan baku dan keterbatasan stock bahan baku dalam pabrik disebabkan oleh berbagai faktor
	Terbatasnya bibit rumput laut yang berkualitas	Harga rumput laut dalam negeri yang sangat fluktuatif	Utilisasi industri pengolahan rumput laut 50-60% dari kapasitas terpasang
2.	Tidak ada atau kurangnya jumlah kebun bibit	Belum adanya Kelembagaan yang mengurus hasil panen (resi gudang masih dalam wacana)	pelaku industri mengalami ketidakpastian dan <i>rescheduling</i> terhadap PO (<i>product order</i>) buyer domestik maupun luar negeri baik dari segi jumlah maupun harga.
3.	Belum banyak yang melakukan berbudidaya rumput laut yang baik	Panjangnya rantai tata niaga	Harga ekspor yang tinggi menyebabkan rendahnya kualitas
4.	Belum terfasilitasinya sistem permodalan	Belum tersedianya sistem logistik bahan baku rumput laut	Stocking yang kurang cermat
5.	Lemahnya kelembagaan penyuluhan	Belum adanya pedoman mengenai hal terkait dengan ekspor impor rumput laut	

Tahapan Produksi Bibit Kultur Jaringan Rumput Laut



No	Tahapan	Hasil	Waktu
1.	Aklimatisasi indukan	Indukan	1,5 bulan
2.	Sterilisasi eksplan thallus	Thalus steril	1 minggu
3.	Induksi kalus	Kalus	4 bulan
4.	Regenerasi kalus/ produksi mikropropagul	Mikropropagul	4 bulan
5.	Produksi thalus muda (propagul)	Thalus muda	3 bulan
6.	Aklimatisasi plantlet (di bak)	Bibit siap turun ke laut	1 bulan
7.	Perbanyakkan bibit di laut.		---

Pelayanan Perizinan



**DASAR
HUKUM**

Permen KP 32 thn 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

UU 25 tahun 2009 ttg Pelayanan Publik

PERMEN-KP No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

PP 96 th 2012 ttg pelaksanaan UU No. 25 thn 2009 ttg pelayanan Publik

Keputusan Dirjen No. 8 thn 2018 tentang standar pelayanan publik Lingkup DJPB

PP 24 thn 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara online

Mekanisme SIUP melalui OSS

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Maks. 60 menit terbit

Komitmen

1. Izin Lokasi
2. Izin Lingkungan
3. PNBP pp 75/2015

SIUP belum
Berlaku efektif

Maks. 60 menit terbit

SIUP Sudah
Berlaku efektif

Maks. 120 Hari kerja terbit

Nilai Positif Tata Kelola Perizinan

Perlindungan

Kepastian hukum bagi pelaku usaha dan penyelenggara perizinan

1

Keseimbangan

Pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha

2

Transparansi

Keterbukaan terhadap mekanisme, waktu dan biaya perizinan

3

Percepatan

Perizinan yang mudah, murah dan cepat tapi akuntabel akan memacu percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi

4

Rekapitulasi Layanan Perizinan yang diterbitkan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Periode 2015-2019

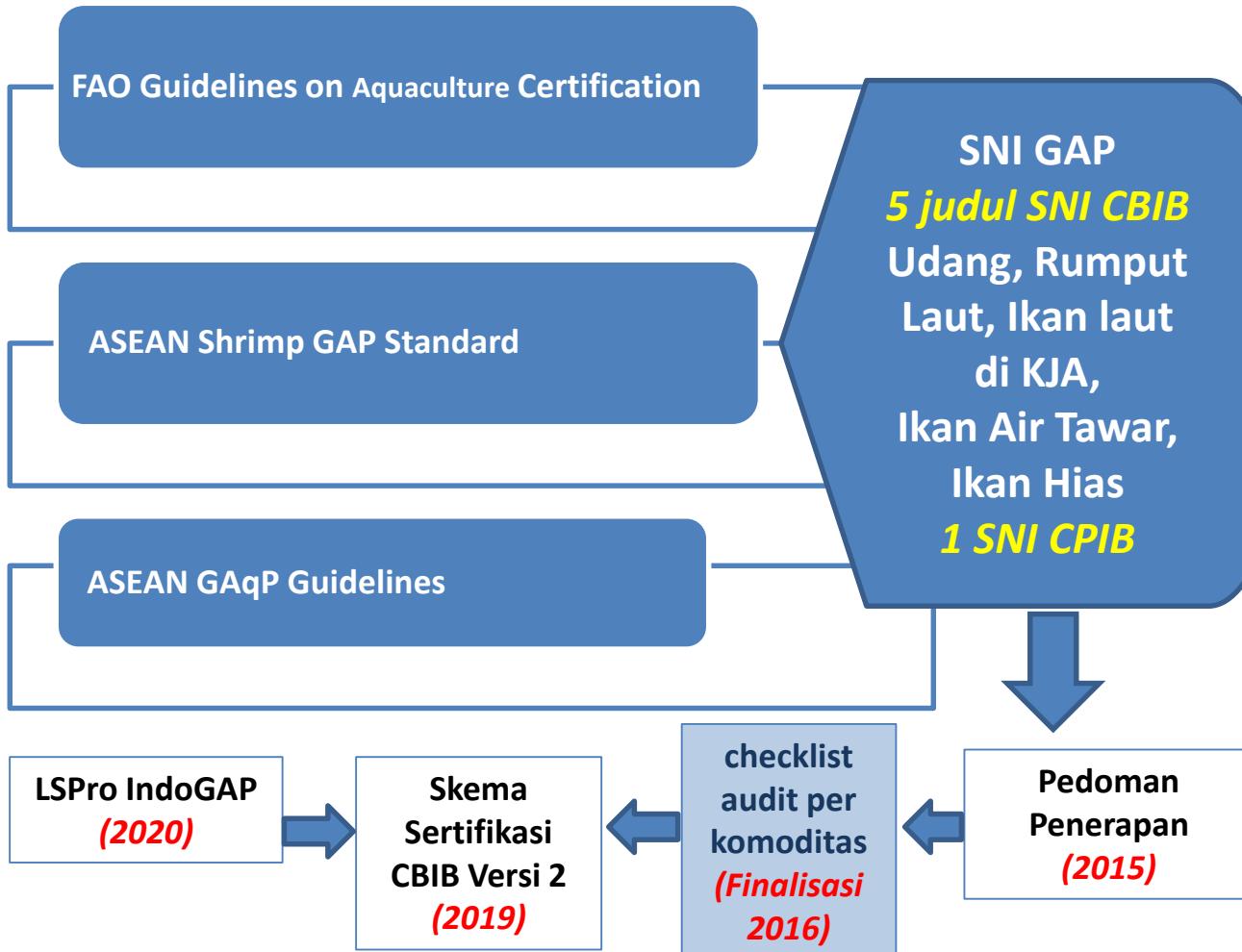
Jenis Layanan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019*
SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)	30	33	38	37	36
Rekomendasi Penanaman Modal (untuk SIUP)	1	6	2	2	3
Rekomendasi Impor Ikan	37	47	45	50	100

Ket: *) s/d Bulan Agustus

Pelayanan Sertifikasi



•Harmonisasi dan Pengembangan Standar Nasional (CBIB Ver-2)



Jumlah SNI PB

- Benih 98 SNI
- Pakan 23 SNI
- Metode Uji 62 SNI
- Pembesaran ikan 89 SNI

Pencapaian SJMKHP

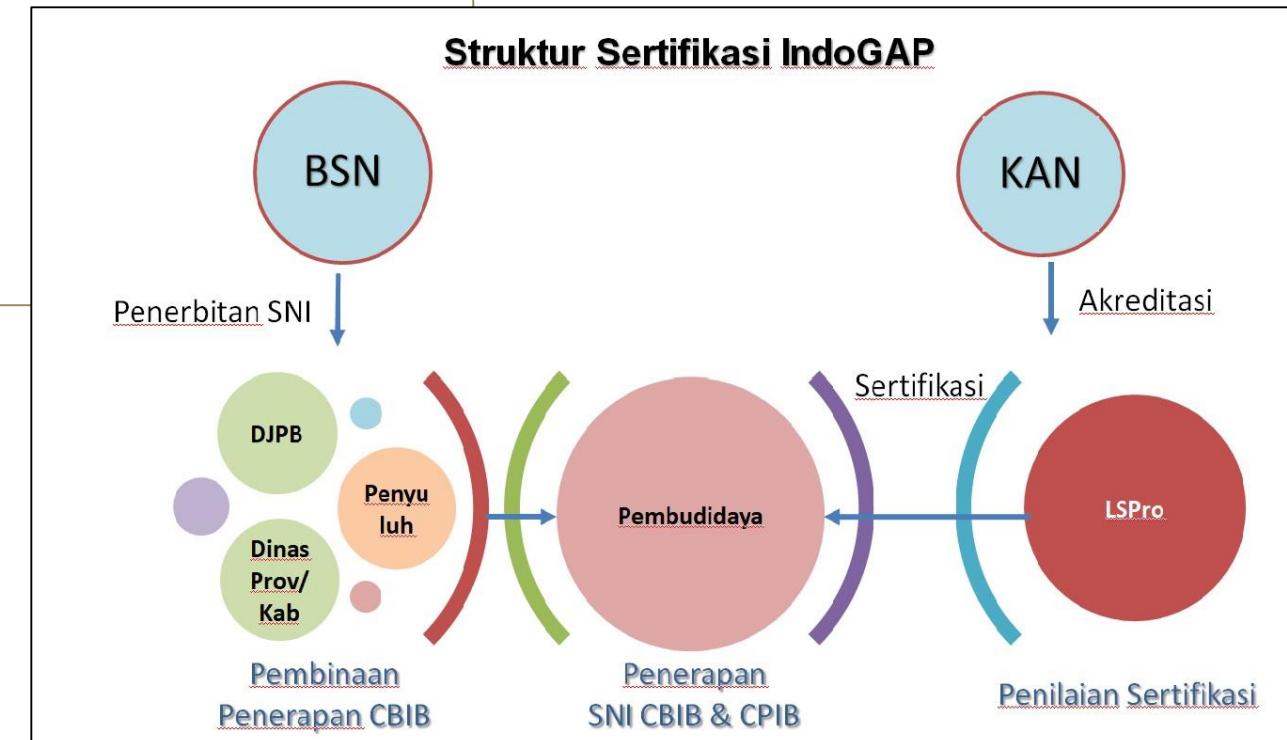
- Unit Perbenihan tersertifikasi 743
- Unit Pembesaran ikan tersertifikasi 9178
- Pakan teregistrasi 904 merk
- Obat ikan teregistrasi 270 merk
- Monres 4000 sampel/tahun



Roadmap Sertifikasi IndoGAP



1. Harmonisasi IndoGAP dengan standar Internasional:
FAO Guidelines for Aquaculture Certification
2. Akreditasi Lembaga Sertifikasi sesuai ISO 17065 LS Proses
3. Benchmark Penyetaraan dengan skema Sertifikasi ASC & GSSI





Terima Kasih.....